

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN
DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

**(Studi Kasus Pada Kota dan Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah Tahun
2015-2017)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**NEILIS SA'ADAH
NIM. 12030115130218**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Neilis Sa'Adah
Nomor Induk Mahasiswa : 12030115130218
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH BELANJA MODAL
TERHADAP PERTUMBUHAN
KINERJA KEUANGAN DAERAH
DENGAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING**
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdul Rohman, M.Si., Akt

Semarang, 2019

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. H. Abdul Rohman, M.Si., Akt)

NIP : 19660108 199202 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Neilis Sa'Adah

Nomor Induk Mahasiswa : 12030115130218

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN
DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVERNING
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah tahun 2015-2017)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Agustus 2019

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak. (.....)
3. Surya Raharja, S.E., M.Si., Ph.D., CA. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Neilis Sa'Adah, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 31 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,

Neilis Sa'Adah

NIM 12030115130218

ABSTRACT

This study intends to analyze the effect of Capital Expenditures on the growth of financial performance with Regional Original Income as an intervening variable. In connection with these problems the following hypothesis is proposed: Capital Expenditures affect Regional Original Revenue, Regional Original Revenues have an effect on Growth of Financial Performance, Capital Expenditures have an effect on Growth Financial Performance and Capital Expenditures have an effect on Growth of Financial Performance through Regional Original Income as an intervening variable.

In line with these problems and hypotheses, the population of this study is the Realization of Budget Revenue Expenditures in the Regency / City in Central Java Province in 2015-2017 and as a sample of Capital Expenditures, Original Regional Revenues, and variables that are parameters for measuring the financial performance of the Regency / City in Central Java Province. The data used is secondary data, to get more accurate data, the method used is documentation. The analytical method used is descriptive statistics, outer model test and inner model test.

Capital Expenditures have a positive and significant effect on Regional Original Revenue, Regional Original Income has a positive and significant effect on Growth of Financial Performance, Capital Expenditures significantly have a direct positive effect on Growth of Financial Performance and Capital Expenditures significantly indirectly has a positive effect on Growth of Financial Performance with Regional Original Income as an intervening variable.

Keywords: Capital Expenditures, Regional Original Revenue, Financial Performance, Agency Theory.

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening. Sehubungan dengan masalah tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut: Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan, Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.

Sejalan dengan masalah dan hipotesis tersebut maka populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 dan sebagai sampel yaitu Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan variabel yang menjadi parameter untuk pengukuran Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan yaitu data sekunder, untuk mendapatkan data yang lebih akurat maka metode yang digunakan yaitu dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji *outer model* dan uji *inner model*.

Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan, Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif secara langsung terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dan Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.

Kata kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan, Teori Keagenan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. (QS. At-Talaq: 3)

The key to realizing a dream is to focus not on success but on significance—and then even the small steps and little victories along your path will take on grater meaning. – Oprah Winfrey

There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death. Again and again before we reach the mountain top of our desires. (Nelson Mandela)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Keluarga tercinta khususnya Mama dan Almarhum Ayah,
yang selalu memotivasi dan menguatkan penulis.

Orang terdekat, sahabat dan teman-teman yang luar biasa.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar dan segala hambatan yang dihadapi penulis dapat teratasi berkat bimbingan, bantuan, dorongan dan doa' dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo., S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Fuad, S.E.T., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, M.Si., Akt selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, dan memberikan nasihat dalam bidang akademis serta motivasi yang mendorong penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

4. Dr. Rr. Sri Handayani, S.E, M.Si., Akt., selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran dan masukan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan berbagai pengajaran dan nasehat dalam perkuliahan.
6. Seluruh Staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan berbagai bantuan dalam proses penyusunan skripsi.
7. Almarhum Ayah H. Mas'Udi yang telah menjadi panutan dalam segala hal dan menjadi pengingat bahwa hidup ini akan selalu berjalan dan selalu semangat menjalaninya meskipun tanpa beliau.
8. Mama Hj. Zulfah Yohana yang telah menjadi sponsor utama hidup saya selama kuliah, pemberi doa paling mujarab dalam hidup saya serta menjadi pendorong dan penyemangat dalam proses penyusunan skripsi.
9. Muhammad Ulinnuha, Devita Ayu Maghviroh, Putri Halimatus Nadia yang telah memberi semangat di rumah dalam proses penyusunan skripsi.
11. Pakdhe, Budhe, Om, Tante keluarga besar semuanya yang telah memberi semangat dan pesan-pesan selama kuliah dan proses penyusunan skripsi.
12. Sahabat-sahabatku Ameng, Suceng, Anggi, Jihan yang telah mewarnai kehidupanku sejak masa sekolah hingga kuliah.
13. Ajeng, Chacha, Desi yang selalu menemani masa-masa kuliah akhir yang penuh dengan lika-liku.

14. Teman-teman bimbingan, Arthy, Aditha dan Crysthi terutama Ajeng yang selalu berbagi informasi dan menjadi penyemangat penulis agar dapat cepat menyelesaikan skripsi.
15. Maryam, Hania, Maudy yang telah menjadi sahabat dari jaman maba hingga sekarang dan selalu menjadi tempat dan pendengar berkeluh kesah serta menjadi penyemangat agar cepat menyelesaikan skripsi.
16. Teman-teman kost Princess Banjarsari: Maryam, Dhiya, Amel, dan Nisa yang turut meramaikan hari-hariku.
17. Teman-teman KKN Desa Randumuktiwaren: Putri, Sarah, Camel, Anis, Denny, Winda, Akbar, Fajar dan Lina yang selalu mendukungku untuk menyelesaikan skripsi saat masa KKN.
18. Teman *teravailable* di Tembalang Mia dan Kusum yang selalu menjadi penolong setia di tembalang disaat susah maupun senang.
19. Teman-teman seperantauan rumpitawati Fadhilla, Suci, Mia, Bening, Karita yang telah menjadi penghibur penulis ketika mulai suntuk dan kehilangan semangat.
20. Seluruh teman-teman Akuntansi Undip 2015 terima kasih sudah menemani, memberikan bantuan, dan berproses bersama selama masa perkuliahan.
21. Semua pihak yang sudah memberikan bantuan, dorongan dan doa' yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan agar karya ini dapat

menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membacanya.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Mei 2019

Penulis

Neilis Sa'Adah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1. Tujuan Penelitian	12
1.3.2. Manfaat Penelitian	13
1.4. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Landasan Teori.....	17
2.1.1. Teori Agensi.....	17
2.1.2. Akuntansi dan Laporan Keuangan Sektor Publik	19
2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	21
2.1.4 Belanja Modal	24
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah	26
2.1.6 Pertumbuhan Kinerja Keuangan	28
2.2. Penelitian Terdahulu	33
2.3. Kerangka Pemikiran.....	39
2.4. Pengembangan Hipotesis	42
2.4.1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah	42

2.4.2.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah.....	44
2.4.3.	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah	45
2.4.4.	Pengaruh Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening.....	46
BAB III	49
METODE PENELITIAN.....	49
3.1	Subyek Penelitian.....	49
3.2	Jenis Data.....	49
3.3	Teknik Pengambilan Sample	49
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	50
3.5.1	Variabel Dependen.....	50
3.5.2	Variabel Independen	55
3.5.3	Variabel Intervening	55
3.6	Uji Kualitas Data.....	56
3.6.1	Metode Analisis Data.....	56
3.6.2	Statistik Deskriptif	58
3.6.3	Pengujian Model Penelitian (<i>Outer Model</i>)	58
3.6.4	Uji Hipotesis	60
BAB IV	62
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1	Deskripsi Penelitian	62
4.2	Analisis Data.....	62
4.2.1	Statistik Deskriptif	62
Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	62
4.2	Pengujian Model Penelitian	65
4.2.1	Uji Outer Model.....	65
4.2.1.1	Uji Validitas	65
4.2.2	Pengujian Hipotesis.....	69
4.2.2.2	Pembahasan.....	69

BAB V.....	77
PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Keterbatasan.....	78
5.3 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kinerja Keuangan Jawa Tengah.....	5
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 4.1 Objek Penelitian.....	61
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	63
Tabel 4.3 Pengujian Validitas.....	66
Tabel 4.4 Pengujian Multikolinieritas.....	67
Tabel 4.5 Pengujian <i>Composite dan Cronbach's Alpha</i>	69
Tabel 4.6 <i>Inner Loading</i>	70
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi.....	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 <i>Outer Model</i>	68

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran Kabupaten dan Kota	85
Lampiran Hasil Uji.....	87
Lampiran Tabulasi Data.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu titik fokus yang penting guna memperbaiki kesejahteraan warga negara. Pengembangan pada suatu wilayah daerah mampu disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan suatu daerah masing-masing. Di Indonesia Undang-undang No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004 memaparkan bahwa “pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Menurut UU tersebut pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. “Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentunya diharapkan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah” (Puspitasari, 2015). Pengelolaan yang baik dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Otonomi Daerah ini menjadi kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan dalam berkreasi pada pembangunan daerahnya, tetapi dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Salah satu penilaian dalam pengelolaan anggaran dikatakan baik adalah melalui penilaian kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja pada suatu organisasi yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas atau mewakili kondisi pada suatu organisasi. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah tersebut dalam hal pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Halim (2007) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan atau tidak dalam kinerja keuangan maka dapat dilakukan analisis keuangan terlebih dahulu, setelah mengetahui hasilnya maka dapat diketahui juga kinerja keuangan perusahaan tersebut dikatakan baik atau buruk. Dalam organisasi pemerintah untuk mengatur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan pertumbuhan (Sularso dan Restianto, 2011).

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah analisis kemampuan suatu perusahaan dengan indikator keuangan yang mewakili realitas sebagai penilaian dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya. Kinerja keuangan hanya salah satu alat untuk mengukur bagaimana prestasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi sesuai dengan prinsip value for money

(efisien, efektif dan ekonomis). Analisis rasio keuangan memudahkan publik dalam menilai kinerja pemda dalam pengelolaan keuangan selain itu juga dapat digunakan sebagai pemerintah untuk membantu membuat strategi keuangan maupun non keuangan berfokus pada tujuan dan sasaran program yang pada akhirnya akan meningkatkan efisien dan efektifitas sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.

Tabel 1.1

Nilai Kinerja Keuangan pemda Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017(%)

Pemerintah Daerah	Derajat Desentralisasi	Rasio Kemandirian	Mobilisasi Daerah	Rasio Efisiensi	SPA
Kab. Banjarnegara	0,137	0,721	0,163	0,078	0,005
Kab. Banyumas	0,192	0,758	0,322	0,120	0,009
Kab. Batang	0,086	0,447	0,587	0,055	0,006
Kab. Blora	0,139	0,988	0,173	0,032	0,006
Kab. Boyolali	0,178	0,894	0,266	0,049	0,013
Kab. Brebes	0,086	0,469	0,484	0,037	0,000
Kab. Cilacap	0,211	0,948	0,242	0,074	0,011
Kab. Demak	0,150	0,917	0,417	0,071	0,008
Kab. Grobogan	0,182	0,768	0,160	0,053	0,014
Kab. Jepara	0,162	2,116	0,275	0,129	0,000
Kab. Karanganyar	0,203	0,917	0,363	0,108	0,007
Kab. Kebumen	0,164	0,980	0,179	0,114	0,008
Kab. Kendal	0,198	0,778	0,270	0,112	0,009
Kab. Klaten	0,144	1,003	0,284	0,184	0,007
Kab. Kudus	0,185	0,933	0,284	0,069	0,010
Kab. Magelang	0,176	0,794	0,281	0,072	0,016
Kab. Pati	0,162	0,872	0,164	0,067	0,006
Kab. Pekalongan	0,148	0,883	0,155	0,096	0,002
Kab. Pemasang	0,179	0,925	0,153	0,102	0,014
Kab. Purbalingga	0,181	0,944	0,159	0,057	0,010
Kab. Purworejo	0,141	0,843	0,179	0,032	0,005

Pemerintah Daerah	Derajat Desentralisasi	Rasio Kemandirian	Mobilisasi Daerah	Rasio Efisiensi	SPA
Kab. Rembang	0,174	1,199	0,199	0,053	0,004
Kab. Semarang	0,195	0,954	0,404	0,075	0,009
Kab. Sragen	0,185	0,657	0,205	0,068	0,006
Kab. Sukoharjo	0,423	1,765	0,548	0,248	0,047
Kab. Tegal	0,153	0,787	0,257	0,049	0,010
Kab. Temanggung	0,173	0,968	0,124	0,038	0,038
Kota Magelang	0,257	0,752	0,134	0,206	0,016
Kota Pekalongan	0,210	0,542	0,319	0,133	0,011
Kota Semarang	0,452	1,812	0,687	0,099	0,006
Kota Salatiga	0,249	0,930	0,226	0,344	0,008
Kota Surakarta	0,292	0,974	0,547	0,128	0,023
Kota Tegal	0,299	0,741	0,225	0,105	0,013

Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah 2019)

Pada tabel 1.1 kita dapat melihat kinerja keuangan dari setiap pemda kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Kita dapat melihat kemampuan keuangan dari nilai rasio kemandirian. Kabupaten Batang, Kab. Brebes dan Kota Pekalongan memiliki kemampuan keuangan yang rendah dimana ketiga kabupaten dan kota tersebut masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dilihat dari rasio efisiensi kabupaten dan kota di Jawa Tengah masuk ke kriteria efisien karena semakin rendah nilai rasio ini maka semakin efisien. Pada rasio desentralisasi fiskal nilai tertinggi yaitu pada Kota Semarang.

Harapan terhadap pelaksanaan otonomi dan kebijakan desentralisasi di Indonesia dimana dapat pemerataan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada setiap daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang disesuaikan. Otonomi daerah memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber

daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dalam era desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pembangunan daerah diserahkan kepada pemda seluas luasnya.

Pembangunan fiskal adalah salah satu wujud upaya peningkatan pelayanan publik pemerintah daerah. Pembangunan daerah dapat berupa pembangunan fiskal yaitu pembangunan fisik meningkatkan sarana prasarana dan infrastruktur suatu daerah. Pembangunan fisik tidak dapat dilaksanakan jika perencanaannya tidak dimasukkan pada rencana keuangan pemerintah yaitu Anggaran Belanja Daerah (APBD). Perencanaan pembangunan dimasukkan pada pos belanja, khususnya belanja modal. Alokasi belanja modal dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. Tentunya dalam pengalokasian belanja modal sebagai pendukung proses pembangunan peran penganggaran sangatlah signifikan.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesat pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisien dan efektifitas diberbagai sektor, produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan perkapita.

Belanja modal merupakan salah satu belanja pemerintah yang menjadi perhatian khusus pemerintah, fenomena yang terjadi seperti yang dikutip dari *Investor Daily* Indonesia pada Selasa, 2 Januari 2018. Penyerapan Belanja Modal APBN 2017 Capai 92,8%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyerapan belanja modal dalam APBNP 2017 sebesar Rp208,4 triliun atau 92,8% dari target merupakan yang tertinggi sejak 2014. Menteri Keuangan Sri Mulyani beranggapan jika hal tersebut merupakan hal yang paling positif ketika belanja modal meningkat dan menjadi tertinggi tiga tahun terakhir.

Sri Mulyani mengatakan belanja modal yang mengalami kenaikan dari sisi eksekusi memperlihatkan kuatnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. "Realisasi ini tumbuh 23% yang menegaskan adanya dorongan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi dan komitmen atas pembangunan infrastruktur," ujarnya. Penyerapan belanja modal pada 2017 ini lebih baik dari realisasi 2014 sebesar 91,6%, 2015 sebesar 86,2% dan 2016 sebesar 82%. Perbaikan kualitas belanja pemerintah pusat ini tidak hanya terjadi untuk penyerapan belanja modal, namun juga atas efisiensi belanja pegawai dan barang serta bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran. Penyerapan belanja pegawai mencapai Rp759,6 triliun atau 95,1%, belanja barang sebesar Rp286,7 triliun atau 96,9% dan bantuan sosial sebesar Rp54,6 triliun atau 100% dari pagu.

Secara keseluruhan, penyerapan belanja Kementerian Lembaga telah mencapai Rp759,6 triliun atau 95,1% dari pagu sebesar Rp798,6 triliun. Selain itu, penyerapan belanja non Kementerian Lembaga yang diantaranya mencakup subsidi sudah mencapai Rp500 triliun atau 88% dari pagu Rp568,4 triliun.

Dengan pencapaian tersebut, maka realisasi belanja pemerintah pusat dalam APBNP 2017 telah mencapai Rp1.259,6 triliun atau 92,1% dari target Rp1.367 triliun. "Semua belanja yang mempengaruhi masyarakat dan ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Ini sesuai dengan tujuan APBN yang ingin melindungi masyarakat dari *shock* merosotnya harga komoditas dan menjaga momentum *growth* tidak merosot di bawah 5%," kata Sri Mulyani. (<https://investor.id/archive/menkeu-penyerapan-belanja-modal-apbn-2017-capai-928>).

Menurut Mulia Andirfa (2016) dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi di berbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan. Pertumbuhan kesejahteraan tersebut berhubungan dengan kinerja keuangan, sejalan dengan yang dikatakan Halim (2012:126), gambaran kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya, dan untuk bersaing secara sehat dengan daerah lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya.

Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang bersumber dari alokasi modal diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan terutama dalam hal keuangan. Menurut Halim dan Muhammad (2014:147), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah

(PAD) bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Kemampuan daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Dalam kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah memberi arti yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah mengalami tren penurunan selama periode 2015-2017. Pada 2015, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mencapai 64,8% (Rp 16,82 triliun), lalu menjadi 58,79% (Rp 19,63 triliun) pada 2016. Lalu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, rasio tersebut kembali turun menjadi 50,9% dari pendapatan daerah senilai Rp 23,47 triliun. Meskipun terdapat peningkatan sebesar 16,7% dari realisasi tahun sebelumnya, target PAD Jawa Tengah pada 2017 sebenarnya mengalami penurunan menjadi Rp 11,9 triliun dari target tahun sebelumnya yang mencapai Rp 12,29 triliun. Penurunan target PAD ini menunjukkan pesimisme

pemerintah dalam membuat rencana proyeksi pendapatan, padahal tren ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/30/berapa-pendapatan-asli-daerah-provinsi-jawa-tengah>

Seperti yang diungkapkan Harianto dan Adi (2007), dalam upaya untuk meningkatkan otonomi daerah, Pemda diwajibkan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal untuk pengembangan sektor-sektor produktif di daerah. Kebutuhan masyarakat yang meningkat tentunya motivasi ini seharusnya dapat mendorong pemerintah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah, dengan memberi perhatian kepada perkembangan pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pada UU No.33 tahun 2004 dijelaskan PAD bertujuan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi suatu daerah. PAD merupakan sumber keuangan dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan suatu daerah. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat atau dengan kata lain mewujudkan kemandirian daerah sesuai tujuan di laksanakannya otonomi daerah.

Setiap daerah memiliki potensi fiskal dan kemandirian daerah yang berbeda-beda. Selain itu otonomi daerah juga tidak hanya diperuntukan untuk

suatu provinsi namun juga suatu Kabupaten dan Kota. Pada tabel 1.1 kita dapat mengetahui bagaimana nilai kinerja keuangan yang dinilai dari beberapa rasio di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai yang berbeda beda serta kondisi yang berbeda setiap daerahnya. Selain tingkat kemampuan dan tingkat kemandirian setiap daerah berbeda, karakteristik setiap daerah dan pembangunan setiap daerah dan keunikan suatu daerah yang berbeda dari satu yang lainnya merupakan suatu alasan untuk melakukan penelitian yang melihat bagaimana belanja pembangunan terhadap kinerja keuangan pada setiap daerahnya.

Berdasarkan dari uraian diatas maka pada penelitian ini penulis ingin melihat adanya pengaruh perencanaan pembangunan fiskal atau anggaran belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan. Penulis ingin melihat adakah pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan pada setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, karena setiap daerah memiliki karakteristik berbeda terutama mengenai kemampuan daerah yaitu belanja daerah serta bagaimana kondisi kinerja keuangan pada setiap pemda. Selain itu penelitian sebelumnya Nugroho (2012) menemukan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, juga menjadi tambahan motivasi untuk meneliti lagi mengenai belanja modal terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajar Nugroho (2012), Puspitasari (2015), Eka (2015). Yang membedakan dengan peniliti sebelumnya adalah penggunaan rasio dalam ukuran penilaian pertumbuhan kinerja keuangan; serta perbedaan rentan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Alasan mengapa peneliti memutuskan untuk memilih penelitian pada pemerintah kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Tengah adalah peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah secara keseluruhan mulai dari tahun 2015-2017. Provinsi Jawa Tengah merupakan tempat dimana peneliti tinggal, hal tersebut menjadikan peneliti semakin ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah provinsi daerahnya tersebut. Penelitian ini sangat penting karena menambah pengetahuan mengenai pengaruh penerimaan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017?

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam sub bagian ini akan dijabarkan dua pembahasan, yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian akan dijabarkan pada sub bab 1.3.1 dan manfaat penelitian akan dijabarkan pada sub bab 1.3.2. Adapun sub bab 1.3.2 dibagi atas dua bahasan, yaitu manfaat secara umum dan manfaat bagi penelitian selanjutnya.

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli daerah sebagai Variabel Intervening pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Manfaat secara umum dijelaskan pada sub bab 1.3.2.1 dan manfaat bagi peneliti dan penelitian selanjutnya akan dijelaskan pada sub bab 1.3.2.2.

1.3.2.1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening. Selain itu, juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan antara teori dan praktik yang sebenarnya di dalam sebuah instansi pemerintahan yang selanjutnya sebagai bahan referensi untuk peneliti lebih lanjut. Selain itu, penulis juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para

mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian penulis dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Selain itu, berguna untuk menambah wawasan peneliti khususnya mengenai pengaruh belanja modal terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening, dan juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi pemerintahan, sehingga dapat membantu instansi dalam meningkatkan kinerjanya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi untuk membantu dan memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang bagaimana pengaruh belanja modal

terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.

1.4. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang melandasi penelitian, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai variabel penelitian, serta definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan, dan metode analisis dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan analisis data.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan, serta saran-saran.